

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perserikatan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 2004.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alummni, Bandung, 2005.
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Herlien Boediono, *Akta Otentik Dan Notaris Pada Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke III Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Kansil, C. S. T, dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Kanter, E. Y, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta , 1999.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan, Djambatan,*, Jakarta 1995.
- Soegondo Notodisoerjo, R. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Perjalanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1982.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseorangan dan Koperasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1969.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio. Cet XXXI, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Nederlands, Notariswet Staatsblad 1999-190, 3rd of Apri 1999.

Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Di *Nederlandsch-Indie*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

C. INTERNET

www.ormas-online.com, Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.